



Bertahan dalam Impunitas di Masa Corona:

Survei Kondisi Korban Pelanggaran HAM Menghadapi Pandemi COVID-19 di Indonesia

**Bertahan dalam Impunitas di Masa Corona:
Survei Kondisi Korban Pelanggaran HAM Menghadapi Pandemi COVID-19
di Indonesia**

Survei ini dilaksanakan atas kerjasama Asia Justice and Rights (AJAR) dengan KontraS Sulawesi, Fopperham Yogyakarta, PASKA Aceh, KPKC Sinode GKI di Tanah Papua, Ikatan Orang Hilang Indonesia (IKOHI), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung, Kiprah Perempuan (KIPPER) Yogyakarta, Jaringan Perempuan Indonesia Timur (JPIT), El-Addper Merauke, ELSHAM Papua, Jayapura Support Group, KATANE Support Group Merauke, Labarik Lakon, Serlina Sembel, dan Alam Surya Anggara.

Terima kasih untuk para relawan survei: Beatrix Gezbe (El-Addper); Ani Sipa (ELSHAM); Astri Wulan, M. Noor Romadlon, Muntiyati, Sugeng Purnomo (Fopperham); Adiyat Jati Wicaksono, Albertus Arga Yuda Prasetya, Alhilyatuz Zakiyah Fillaily, Hidayah Sri, Rizky Lani Permata, Zaenal Mutaqin (IKOHI); Agustin Selbard Zacharias, Juandini Amelia Lapaan, Martha Bire (JPIT); Sitti Soltief (Jayapura Support Group); Herlina Fonataba (KATANE Support Group); Pipit Ambarmirah (KIPPER); Agung Seldy Arimsyah, Aswin, Asyari Mukrim, Rezki Ameliah Arief (KontraS Sulawesi); Pdt. Magdalena Kafiar, Cicil, Maria (KPKC Sinode GKI di Tanah Papua); Harold Aron, Wisnu Prima Ramadhan (LBH Bandung); Faridah, Fadhlina, Farida Haryani, Nurul Aini, Radiah, Zainora Idris (PASKA Aceh); Alam Surya Anggara; Serlina Sembel.

Penyusun:

Dodi Yuniar, Mulki Makmun, Emmanuella Kania Mamonto, Morentalisa Hutapea, Sornica Ester Lily, Raisa Widiastari

Ilustrasi sampul depan:

Fauzan Adinugraha

Desain:

Raisa Widiastari

Tentang Asia Justice and Rights

Asia Justice and Rights (AJAR) adalah organisasi non-profit yang berkedudukan di Jakarta, Indonesia. AJAR memiliki misi untuk meningkatkan kapasitas aktor lokal dan nasional, khususnya organisasi korban, dalam perjuangan melawan impunitas, dan turut mendorong terwujudnya kehidupan yang didasarkan pada prinsip akuntabilitas, keadilan, dan kemauan untuk belajar dari akar masalah pelanggaran HAM. AJAR memfokuskan kerjanya pada isu transformasi konflik, HAM, pendidikan, dan penguatan komunitas di kawasan Asia Pasifik.

Konten dalam dokumen ini dilisensikan di bawah Creative Commons (atribusi, non komersial, tanpa turunan 4.0 internasional).
<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode>

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan kunjungi: www.asia-ajar.org

Bertahan dalam Impunitas di Masa Corona:

Survei Kondisi Korban Pelanggaran HAM Menghadapi Pandemi COVID-19 di Indonesia

Mei 2020

Asia Justice and Rights (AJAR)
KontraS Sulawesi, Fopperham, PASKA Aceh, KPKC Sinode
GKI, Ikatan Orang Hilang Indonesia (IKOHI), Lembaga
Bantuan Hukum (LBH) Bandung, Kiprah Perempuan
(KIPPER), Jaringan Perempuan Indonesia Timur (JPIT), El-
Addper, ELSHAM Papua, Jayapura Support Group, KATANE
Support Group, Labarik Lakon

Ringkasan Eksekutif

Pengaruh pandemi secara signifikan mengubah kehidupan setiap orang, namun dampak yang lebih buruk akan menimpa orang yang sejak awal telah memiliki kerentanan termasuk korban dan keluarga korban pelanggaran HAM, termasuk di dalamnya komunitas adat, ODHA dan korban perdagangan orang. Mereka adalah kelompok yang perlu mendapatkan perhatian khusus, karena terdapat ribuan lansia yang masih harus berjuang keluar dari dampak pelanggaran HAM yang menempatkan mereka hidup dalam kemiskinan sekaligus mengalami diskriminasi dan stigma sosial.

Terkait dengan hal tersebut, selama bulan April 2020 Asia Justice and Right (AJAR) bersama mitra-mitranya mengadakan survei yang ditujukan untuk memetakan kondisi korban. Survei ini dilakukan di 13 provinsi dengan menjangkau 402 narasumber yang sebelumnya telah didokumentasikan oleh para mitra, individu, atau organisasi korban di wilayahnya. Mereka merupakan korban dari peristiwa pelanggaran HAM Mei '98, Tanjung Priok, kejahatan kemanusiaan 1965-1966, konflik berbasis militer di Aceh dan Papua, Stolen Children dari Timor-Timur, dan korban tindak perdagangan orang. Terdapat juga responden dari kelompok perempuan ODHA di Papua yang berurusan erat dengan situasi konflik saat ini.

Melalui survei ini kami menemukan sejumlah isu kritis yang harus diperhatikan yaitu besarnya kebutuhan korban akan pasokan bahan makanan karena banyak dari mereka yang terluput dari proses penerimaan bantuan pemerintah. Pentingnya memastikan korban mendapat akses kesehatan, terutama bagi korban lansia dan komunitas ODHA. Survei ini juga memperlihatkan bagaimana impunitas dan menyempitnya ruang demokrasi saat ini mempengaruhi pola hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya, terutama dengan kelompok yang menjadi korban pelanggaran HAM di masa pandemi. Survei juga menemukan bahwa bantuan yang ada tidak bisa memberikan pemulihan yang efektif dan jangka panjang, rendahnya kepercayaan korban atas kebijakan yang dibuat pemerintah termasuk informasi yang disebar, namun sekaligus menjadi pencetus inisiatif masyarakat untuk bahu-membahu mencari opsi bertahan hidup di tengah pandemi.

Laporan ini memuat rekomendasi yang ditujukan kepada pemerintah di semua level kepada memastikan transparansi informasi, dilandasi oleh prinsip HAM dan memastikan korban mendapat pemenuhan haknya; kepada kelompok masyarakat sipil yang peduli terhadap kondisi korban pelanggaran HAM untuk mengawasi pelaksanaan pemenuhan hak dari pemerintah; dan kepada masyarakat secara luas untuk menjaga sikap kritis dalam membaca dan menyebarkan informasi terkait COVID-19.

Latar Belakang

Dalam beberapa bulan terakhir kita dihadapkan dengan narasi mengenai cara umat manusia di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia, bertahan melawan COVID-19. Pengaruh pandemi secara signifikan mengubah kehidupan setiap orang, namun dampak yang lebih buruk akan menimpa orang yang sejak awal telah memiliki kerentanan termasuk korban dan keluarga korban pelanggaran HAM. Mereka adalah kelompok yang perlu mendapatkan perhatian khusus, karena terdapat ribuan lansia yang masih harus berjuang keluar dari dampak pelanggaran HAM yang menempatkan mereka hidup dalam kemiskinan sekaligus mengalami diskriminasi dan stigma sosial.

Saat ini Indonesia menjadi negara dengan salah satu tingkat infeksi dan tingkat kematian tertinggi (*case fatality rate*) di dunia. Namun pemerintah Indonesia tampak tidak menerapkan kebijakan penanganan yang konsisten dan menyediakan informasi yang memadai. Suatu kondisi yang akan memperbesar resiko korban dan membuat mereka semakin sulit bertahan, bahkan berpotensi kembali mengalami trauma masa lalu.

Kita sebagai bangsa tidak dapat mencari solusi tanpa berani menghadapi kebenaran secara objektif.

Penyimpangan fakta hanya akan memperburuk masalah dalam jangka panjang. Terdapat hubungan antara kesehatan dan hak asasi manusia yang dapat dipelajari dari berbagai peristiwa untuk membantu kita menghadapi tantangan saat ini seperti, kelaparan besar di Cina tahun 1948, Timor-Timur saat konflik 1978-1979, wabah malaria yang menimpa tahanan politik di Pulau Buru dari 1968 sampai 1978, dan kelaparan dan wabah penyakit di ladang pembunahan di Kamboja tahun 1975-1979. Amartya Sen, peraih Nobel untuk Ilmu Ekonomi tahun 1998, menulis tentang bagaimana kurangnya demokrasi –ditunjukkan oleh pembuatan dan penegakan kebijakan yang buruk, dapat menjadi faktor yang memperburuk kondisi seperti yang disebutkan di atas.¹

There's a plague, there are victims, and it's the duty of good man not to join forces with the plagues.

– The Plague, Albert Camus

Untuk itu, selama bulan April 2020 AJAR bersama mitra-mitranya melakukan survei bersama untuk mendapat potret kondisi korban dan keluarganya dalam bertahan di masa pandemi. Potret ini diharapkan dapat menjadi acuan setiap elemen baik individu,

komunitas, dan pemerintah dalam mencari langkah terbaik untuk mencegah dan mengurangi resiko kerentanan korban yang tidak hanya berfokus pada jaminan kesehatan, tetapi juga dalam kehidupan ekonomi dan sosialnya.

1. Catatan ini diambil dari opini Galuh Wandita (Direktur AJAR) berjudul "Truth in the Time of Corona: International Day on Right to Truth, Dignity of Victims" di thejakartapost pada 24 Maret 2020, diakses pada 8 Mei 2020, <https://www.thejakartapost.com/academia/2020/03/24/truth-in-the-time-of-corona-international-day-on-right-to-truth-dignity-of-victims.html>

Metode

Pengumpulan data dilakukan oleh AJAR bersama dengan KontraS Sulawesi, Fopperham Yogyakarta, PASKA Aceh, KPKC Sinode GKI di Tanah Papua, IKOHI, LBH Bandung, KIPPER Yogyakarta, JPIT NTT, El-Addper Merauke, Jayapura Support Group, KATANE Support Group Merauke, dan Labarik Lakon. Pengumpulan data juga dilakukan oleh relawan individu yaitu Serlina Sembel dan Alam Surya Anggara. Survei mencakup 13 provinsi yaitu Aceh, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, dan Papua.

A. Pengumpulan data dan responden

Responden survei ini adalah 402 orang korban dan keluarga korban pelanggaran HAM yang sebelumnya telah didokumentasikan oleh para mitra, individu, atau organisasi korban di wilayahnya. Mereka merupakan korban dari peristiwa pelanggaran HAM Mei '98, Tanjung Priok, kejahatan kemanusiaan 1965-1966, konflik berbasis militer di Aceh dan Papua, Stolen Children dari Timor-Timur,² dan korban tindak perdagangan orang. Terdapat juga responden dari kelompok perempuan ODHA di Papua yang berurusan erat dengan situasi konflik saat ini.

Pengumpulan data sebagian besar dilaksanakan via telepon, sementara sebagian kecilnya dengan mendatangi langsung para korban. Dalam pengumpulan data secara langsung, para relawan survei tetap berpedoman pada langkah pencegahan penularan COVID-19. AJAR mengelompokkan data yang terkumpul untuk melihat perhitungan angka dan mengumpulkan narasi, yang menjadi acuan penulisan temuan survei ini. AJAR juga melakukan verifikasi melalui diskusi bersama para mitra yang melakukan survei.

B. Tantangan dan terobosan

Selama survei ini dilaksanakan, terdapat beberapa tantangan dan terobosan yang muncul, antara lain:

- Survei yang awalnya direncanakan hanya menggunakan telepon akhirnya harus dikombinasikan dengan kunjungan langsung karena terdapat korban yang berada di wilayah yang tidak memiliki sinyal atau tidak memiliki alat komunikasi.
- Beberapa korban memiliki jarak cukup jauh dari domisili mitra sehingga proses pengumpulan data memakan waktu.
- Beberapa relawan mengalami penolakan karena melakukan kunjungan ke wilayah yang membatasi kedatangan orang luar atau karena penduduk wilayah yang didatangi khawatir tertular COVID-19.
- Namun demikian, kunjungan langsung menjadi kesempatan bagi para relawan untuk menyebarkan informasi, lewat brosur yang dibuat AJAR, terkait COVID-19 dan cara untuk menghindari penularan. Di beberapa wilayah, kunjungan juga dikombinasikan dengan penyaluran bantuan bahan makanan dan alat-alat kesehatan.

2. Informasi lebih detail mengenai Stolen Children dari Timor-Timur dapat dibaca di laporan AJAR berjudul "Meniti Jalan Pulang: Membawa Anak-anak Timor-Leste yang Dicuri dan Dibawa ke Indonesia untuk Bertemu Kembali dengan Keluarga Mereka," 30 Agustus 2016. Laporan dapat diakses di <https://asia-ajar.org/2016/08/long-journey-home-stolen-children-timor-leste/>

Temuan-temuan

Survei ini menjangkau korban dan keluarga korban pelanggaran HAM dalam rentang usia 25 sampai 90 tahun dengan jumlah terbesar di kelompok umur 65-85 tahun. Kelompok ini umumnya tinggal sendirian, sementara kelompok lain rata-rata hidup bersama 3 hingga 9 anggota keluarga lainnya. Temuan ini memperlihatkan bahwa korban berusia lanjut memiliki kerentanan ganda karena dalam kondisi kesehatan yang kurang baik akibat usia tua, mereka tidak memiliki penopang hidup lain selain diri mereka.

Banyak korban tidak mampu mengukur dan menghitung sumber penghidupan mereka sehingga tidak memiliki pengetahuan berapa lama akan bertahan apabila aturan pembatasan sosial diterapkan atau diperpanjang di wilayah mereka. Tidak konsistennya penerapan kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) disertai lemahnya pengelolaan bantuan sosial dari pemerintah mempersulit korban dalam mengukur kemampuan bertahan mereka. Beberapa korban juga menyatakan hilangnya sumber penghidupan mereka, terutama korban dengan penghasilan harian. Di sisi lain, sebagian besar korban belum mendapat akses bantuan saat survei ini dilaksanakan.

Secara lebih rinci, temuan survei ini terdiri dari:

Keterbatasan akses terhadap pangan

Keterbatasan utama yang muncul adalah akses para korban dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka untuk bertahan hidup. Hampir semua korban menyatakan bahwa mereka kesulitan untuk mendapatkan makanan, umumnya disebabkan hilangnya pekerjaan atau karena tidak dapat mengakses lahan pertanian dan peternakan mereka yang berada di wilayah perkotaan dan padat penduduk lebih sulit dalam mencari alternatif pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Mereka yang umumnya berprofesi sebagai pedagang, ojek, atau pekerja harian, menyambung hidup melalui bantuan dari pihak lain atau dengan terpaksa tetap bekerja.

Korban di wilayah pedesaan memiliki kondisi yang lebih baik dalam akses pangan meskipun mengalami keterbatasan akses lahan dan distribusi untuk menjual hasil ladang dan ternak akibat kebijakan pembatasan pemerintah. Selain itu, mereka terancam tidak mendapat pasokan yang memadai dari segi ketersediaan dan asupan gizi. Saat survei dilaksanakan, banyak yang bertahan hidup dari pasokan panen pada Desember 2019. Di Yogyakarta bahkan mengalami gagal panen dan di NTT, selain gagal panen, korban juga kehilangan ternak karena African Swine Fever.

“Paling lama seminggu bisa bertahan dari tabungan yang sudah ada sekarang. Lebih dari seminggu kalau tidak ada bantuan pangan ya harus keluar lagi berjualan walaupun sedikit hasilnya. Yang penting tetap bisa makan dulu, minimal 2 kali sehari.”

- Robert da Silva, Stolen Children di Jakarta.

“Semua barang sayur turun harga jadi penghasilan saya kurang, hasil kebun saya tidak ada yang beli lagi, hubungan dengan masyarakat berkurang, pengajian ditutup.”

- Ti Laibah Abbas, korban kekerasan militer di Pidie, Aceh.

“Kami tidak bisa bertani tahun ini karena hujan sangat sedikit. Sumur sumber mata air kami selama ini kering, hanya bergantung pada sumur bor tetangga untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari.”

- Rosy Wadu Doko, keluarga penyintas 65 di Sabu, NTT.

TEMUAN-TEMUAN

Secara khusus di Papua dan NTT, banyak korban perempuan mendapat beban baru karena menjadi tulang punggung nafkah keluarga ketika anak dan suami kehilangan penghasilan.

“Mama sudah tidak bisa bicara lagi sebab semua serba susah, tidak bisa jualan jadi mama kasi pengertian buat anak-anak kita makan hasil kebun dengan cara 2 macam: rebus dan bakar.”

- KI, korban kekerasan militer di Papua.

Meningkatnya kerentanan karena akses kesehatan minim

Akses fasilitas kesehatan yang penting bagi para korban selama ini menjadi terganggu akibat COVID-19. Para korban merasa khawatir untuk mendatangi fasilitas kesehatan sehingga terpaksa membatalkan

pengecekan rutin mereka. Beberapa korban meminta bantuan mitra dan dampingan korban untuk mendapatkan obat-obatan yang rutin mereka konsumsi untuk penyakit seperti hipertensi, jantung, dan diabetes. Kondisi ini banyak menimpa penyintas 65 di Yogyakarta yang mayoritas adalah lansia. Sementara korban di Sulawesi Selatan, Aceh, Jawa Tengah, dan NTT tidak memeriksakan kondisi diri atau keluarganya yang sedang sakit di puskesmas atau rumah sakit karena takut tertular COVID-19. Sementara korban lain tinggal korban cukup jauh dari layanan kesehatan sehingga mereka memutuskan untuk melakukan perawatan mandiri di rumah.

“Saya tidak bisa ke rumah sakit karena rumah sakit tempat biasa saya berobat jadi rumah sakit rujukan COVID-19, padahal bulan awal bulan april lalu saya harusnya operasi polip.”

- Y Sumardi, penyintas 65 di Yogyakarta.

“Waktu sakit karena Puskesmas Pembantu jauh jadi kami hanya beli obat paracetamol di kios untuk minum setelah makan. Dan sekarang kami semua dalam rumah ada sehat-sehat saja. Kami butuh makanan dan juga layanan kesehatan saat sakit.”

- Berta Tunbonat, penyintas perdagangan orang di Kupang, NTT

Sebagian besar korban juga tidak dapat mengakses jaminan kesehatan termasuk alat-alat kebersihan untuk mengurangi penyebaran virus. Kewajiban untuk mengenakan masker selama berada di ruang publik yang dikeluarkan pemerintah Kabupaten Pidie, Aceh misalnya, tidak disertai dengan penyediaan akses masker secara memadai sehingga menjadi permasalahan bagi para korban. Sementara itu, komunitas ODHA di Papua kehilangan akses mendapatkan obat yang mereka butuhkan.

“Sekarang pemerintah daerah sudah tidak lagi support Yayasan kita untuk melakukan pendampingan, sehingga kita sulit untuk memberi akses obat seperti biasanya kepada ODHA,”

- LM, pendamping komunitas ODHA di Papua.

Hilangnya jaminan masa depan anak

Korban juga merasakan hilangnya jaminan atas masa depan keluarga dan anak-anak mereka akibat terbatasnya kemampuan untuk mengakses pendidikan jarak jauh. Kebijakan pemerintah untuk membatasi kehadiran siswa di sekolah dan menggantikannya dengan belajar jarak jauh tidak dibarengi oleh pertimbangan kondisi ekonomi dan geografis beberapa kelompok masyarakat. Anak-anak korban yang berada di wilayah terpencil seperti NTT, Sulawesi Selatan dan Papua selain belum memiliki akses terhadap listrik dan internet juga tidak memiliki alat dengan teknologi memadai. Sementara anak-anak korban yang memiliki akses memadai terhadap internet harus mengeluarkan biaya cukup mahal untuk mengakses kebutuhan selama mengikuti kelas, terlebih ketika harus mengirim tugas secara online ke guru mereka. Akibat keterbatasan ini, tidak sedikit dari mereka yang berhenti mengikuti kelas.

“Saya sudah tidak sekolah. Saya rindu sekolah. Tapi saya tidak punya televisi untuk lihat pelajaran di televisi. Saya hanya tinggal di rumah, dan pergi ke rumah sakit untuk berobat.”

- IT, remaja ODHA di Papua.

TEMUAN-TEMUAN

“Tidak bekerja lagi karena semua harus diam di rumah. Karena tidak bekerja jadi sulit memenuhi kebutuhan sehari-hari. Anak kuliah dan sekolah saat ini belajar di rumah dan butuh pulsa untuk online kadang tidak bisa kasih karena tidak ada uang.”

- Roberto da Costa, Stolen Children di Manado, Sulawesi Utara.

Hambatan dalam mengakses pendidikan juga berasal dari aktor non-negara ketika perusahaan perkebunan membuat kebijakan pembatasan di wilayah mereka tanpa dibarengi dengan jaminan pemenuhan hak pendidikan anak dari pemerintah setempat. Kondisi ini terjadi di Kalimantan Tengah ketika anak dari korban tidak dapat mengakses ujian yang dilaksanakan di luar areal perkebunan perusahaan.

“Dua anak saya tidak bisa mengikuti ujian di sekolah (di luar area perkebunan) karena dilarang oleh pihak perusahaan untuk keluar area perkebunan.”

- Antoni, Stolen Children di Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah.

Kondisi korban yang tidak memiliki kemampuan untuk mendampingi anaknya belajar di rumah juga menjadi salah satu faktor penghambat anak dari korban tidak bisa mengikuti pendidikan secara maksimal.

“Sekolah anak saya diliburkan, pihak sekolah menghimbau untuk melakukan kegiatan belajar dari rumah, tapi karena saya harus rapi-rapi rumah dan memasak saya tidak punya waktu untuk mendampingi anak saya belajar.”

- Aisyah, Stolen Children di Sumedang, West Java.

Hilangnya dukungan komunitas akibat keterbatasan kegiatan sosial, budaya, dan keagamaan

Para korban juga mengeluhkan pembatasan dalam mengikuti ritual keagamaan di rumah ibadah sehingga memaksa mereka beribadah di rumah. Bagi banyak korban, ritual ibadah adalah salah satu cara penting untuk bertahan menjalani kehidupan yang penuh trauma dari peristiwa kekerasan masa lalu. Hal ini disampaikan langsung oleh para korban di Kupang,

Beberapa kebiasaan yang dilakukan di wilayah korban sebagai bentuk perekat persaudaraan seperti kebiasaan cium hidung di NTT dan makan pinang di beberapa tempat di Indonesia Timur juga ikut dibatasi. Lebih lanjut, pertemuan yang sudah rutin dilakukan oleh kelompok penyintas 65 di Jawa Tengah dan Yogyakarta juga harus dihentikan sementara. Pertemuan rutin antar penyintas 65 ini adalah salah satu sumber kekuatan dan semangat untuk hidup bagi mereka, terutama bagi para korban yang tinggal sendirian.

“Kami tidak bisa beribadat di gereja maupun ibadat rumah tangga di tetangga karena sudah ada himbauan dari GMT untuk beribadah di rumah. Saya juga tidak bisa menghadiri upacara pemakaman keluarga yang meninggal sebagaimana sudah menjadi budaya yang sangat kuat bagi kami suku Sabu bagi keluarga yang berduka.”

- Sarlotha Dami Dato-Kopi Lede, penyintas 65 di Kupang, NTT.

“Tidak bisa berkumpul dan bertemu dengan teman-teman, rasanya sepi sekali penghasilan utama dari jasa menunggu rumah orang dan tidur di sana sendirian. Sempat 3 kali pingsan tidak ada yang menolong karena sendirian.”

- Sarjiyah, penyintas 65 di Yogyakarta.

Pihak yang terlibat dalam melakukan survey:

AJAR, KontraS Sulawesi, Fopperham, PASKA Aceh, KPCC, IKOHI, LBH Bandung, KIPPER, JPIT
El-Addper Merauke, ELSHAM Papua, Jayapura Support Group, KATANE Support Group, Labarik Lakon

Survei Kondisi Korban Pelanggaran HAM dalam Menghadapi COVID-19

Data yang tersaji berdasarkan pengumpulan selama bulan April 2020, kecuali wilayah Papua di bulan Mei 2020.

402
RESPONDEN

- Korban: 75,4 %
- Keluarga Korban: 21,6%
- Korban sekaligus keluarga korban: 3%

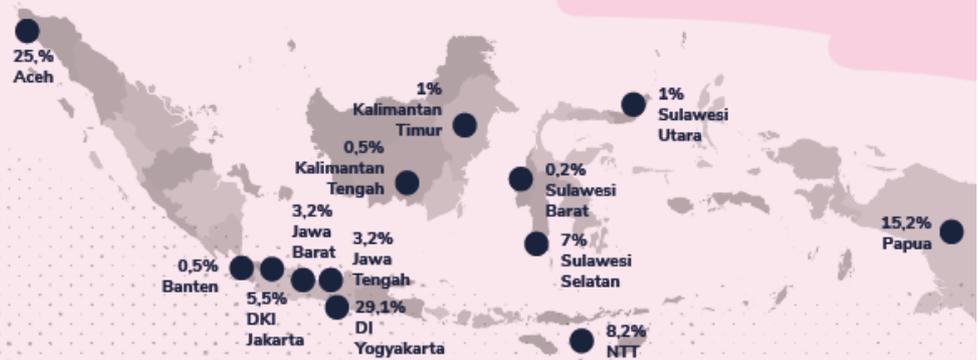
**Rentang usia paling banyak
antara 65-84: 37,3%**
45-64: 37,1%
25-44: 19,8%
Di atas 85 tahun: 2,5%

Wilayah Responden

Aceh	25,4%
Banten	0,5%
DKI Jakarta:	5,5%
Jawa Barat:	3,2%
Jawa Tengah:	3,2%
DI Yogyakarta:	29,1%
Kalimantan Tengah:	0,5%
Kalimantan Timur:	1%
Sulawesi Selatan:	7%
Sulawesi Barat:	0,2%
Sulawesi Utara:	1%
NTT:	8,2%
Papua:	15,2%

KELOMPOK KORBAN

- Kejahatan kemanusiaan 1965-1966: 36,3%
- Konflik berbasis militer (Aceh dan Papua): 33,1%
- Stolen Children (Timor-Timur): 14,7%
- Perempuan dengan HIV/AIDS (Papua): 7,5%
- Perdagangan Orang: 4,2%
- Peristiwa Mei 98: 4%
- Tanjung Priok: 0,2%



17,7% korban tinggal sendirian di rumah
Tinggal bersama 1 hingga 3 orang: 49,8%
Tinggal bersama 4 hingga 6 orang: 24,6%
Tinggal bersama 7 hingga 9 orang: 6,7%
Tinggal bersama 10 hingga 12 orang: 1,2%

* Korban yang tinggal sendiri umumnya berusia di atas 55 tahun



Kebutuhan paling mendesak karena COVID-19



Akses atas pangan:

90%



Akses atas kesehatan termasuk alat perlindungan diri seperti masker:

68%



Akses atas pekerjaan:

37%



Rasa aman:

30%



Akses atas pendidikan untuk anak:

14%



Pemulihan:

8%

Sumber peghidupan dalam situasi isolasi di rumah / PSBB

40% tidak dapat menghitung kebutuhan hidupnya dan mengukur berapa lama bisa bertahan jika melakukan isolasi di rumah, 7% hanya bertahan kurang dari 3 hari, 34% hanya dapat bertahan 3-7 hari, 14% dapat bertahan dalam 2 minggu dan 4% hingga 1 bulan.



65% belum mendapat bantuan

35% sudah mendapat bantuan dari beberapa pihak seperti pemerintah, LSM, lembaga agama, dan lainnya.

14% RESPONDEN

belum mendapat informasi tentang COVID-19

86% telah mendapat informasi tentang COVID-19 namun tidak memiliki pengetahuan yang memadai untuk merespon, sebagian justru memunculkan trauma karena kesimpangsiuran berita mengingatkan mereka akan masa konflik.

TEMUAN-TEMUAN

Informasi tidak akurat dan tidak peka kondisi korban

Banyak korban mengalami kebingungan akibat tidak adanya kejelasan mengenai kebijakan pembatasan yang diberlakukan dan dampaknya, dan kurangnya informasi mengenai COVID-19 yang akurat termasuk cara menghindari penularan. Pemberian informasi yang sangat “kotasentris” mempersulit para korban, khususnya di wilayah pedesaan untuk memahami perlindungan diri terhadap COVID-19.

Lebih dari itu, metode penyebaran informasi lewat aparat pemerintah yang tidak peka akan masa lalu korban, serta lemahnya kondisi pendengaran korban yang sudah lansia, justru membangkitkan trauma masa lalu mereka, secara khusus bagi korban di Aceh dan Yogyakarta. Suara sirine, pengumuman dengan pengeras suara, aparat berseragam yang hilir mudik, tanpa ada informasi yang disampaikan secara jelas dan menyeluruh, mengingatkan mereka akan masa konflik dan kekerasan yang pernah mereka alami di masa lalu.

“Pemerintah Kuningan belum memberi bantuan apapun, warga masih main voli seperti biasa bahkan perantau Jakarta yang harusnya dikarantina tapi tidak ada treatment apapun.”

- Bahrul, Stolen Children di Kuningan, Jawa Barat.

Beberapa korban juga menyuarakan lambatnya respon pemerintah dalam menangani para pemudik yang datang ke wilayah mereka. Kondisi ketidakjelasan informasi serta tidak konsistennya aturan pemerintah menambah kekhawatiran mereka saat ini.

Minimnya ketersediaan bantuan dan dukungan bagi korban pelanggaran HAM

Sebagian besar korban yang berhasil dijangkau dalam survei ini membutuhkan bantuan pangan yang mendesak dan langsung. Sebagian kecil korban telah mendapatkan bantuan dari pemerintah dan sebagian lainnya masih menunggu proses penerimaan bantuan. Akan tetapi banyak korban tidak mengetahui cara mengakses bantuan jika tidak ada dukungan dari komunitas dampingan di wilayah mereka. Selain ketidakjelasan pendataan dan kriteria penerima bantuan, stigma sosial yang mengakar di lingkungan tempat korban tinggal dinilai menjadi faktor yang menyebabkan sulitnya para korban mendapatkan akses bantuan.

“Bantuan dari pemerintah hanya ada penyemprotan disinfektan itupun hanya sedikit, yang lain tidak ada (masker, sembako) dan karena dianggap tidak terlalu membutuhkan, ada yang lebih parah sekali, saya tidak lolos verifikasi kelurahan, padahal saya sama terdampaknya karena kegiatan ekonomi saya berhenti.”

- Wijayanto, penyintas 65 di Ambarawa, Jawa Tengah

Melihat kurangnya respon pemerintah, kelompok masyarakat sipil berinisiatif menyalurkan bantuan kebutuhan pokok dan menyebarkan informasi seputar COVID-19 kepada korban dan keluarganya. Mitra AJAR seperti PASKA, IKOHI, Fopperham, KIPPER dan JPIT menyalurkan bantuan sembako termasuk vitamin bagi korban lansia. Sementara KPKC, Elsham Papua, El-Addper Merauke di Papua, serta KontraS Sulawesi menyebarkan informasi ke korban dampingan mereka. Para relawan di Jawa

Tengah menjadikan diri mereka jembatan penghubung korban dengan berbagai komunitas lain yang memiliki sumber bantuan. Pada saat yang sama, lembaga keagamaan di Aceh, Yogyakarta, dan NTT hadir sebagai tempat bersandar dalam mengurangi kecemasan para korban dengan memberikan pelayanan agama serta membagikan sembako.

“Saya sudah mendapatkan informasi tentang COVID-19 dari televisi dan juga dari desa. Saya merasa kurang percaya dengan informasi yang datang dari pemerintah, karena informasi simpang siur dan keadaan rakyat kacau begini. Tapi intel-intel Kodim tidak pernah datang lagi semenjak Corona.”

- Munari, penyintas 65 di Jawa Tengah.

“Sampai Corona ini tidak ada informasi yang pasti, jangankan dari kabupaten, pemerintah kampung tidak ada.”

- KI, korban kekerasan militer di Papua.

“Pemerintah harus memperhatikan orang tidak mampu. Karena kalau dipikirkan selama ini pemerintah tidak memberikan perhatian, terutama kami Labarik Lakon (bahasa tetum: anak hilang).”

- Ali Nani, Stolen Children di Gowa, Sulawesi Selatan.

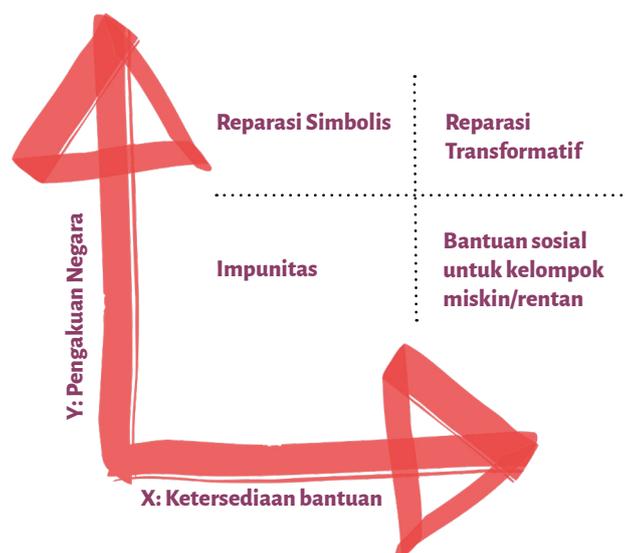
Kesimpulan

Saat Indonesia menghadapi tantangan pandemi COVID-19 saat ini, impunitas yang terpelihara dan pembatasan suara kritis akan mengokohkan batu sandungan untuk melangkah maju menjadi bangsa yang besar. Belajar dari pengalaman bangsa lain, keberanian untuk membuka kebenaran objektif akan menjadi modal yang kuat dalam mencari solusi dari kesulitan. Hal ini semestinya disertai dengan keberpihakan yang jelas untuk pemenuhan hak bagi mereka yang paling membutuhkan. Dalam situasi ini menjadi penting untuk memastikan negara tidak mereduksi pemenuhan pertanggungjawabannya hanya lewat penyediaan bantuan kebencanaan. Negara wajib menyediakan pemulihan dan reparasi bagi korban pelanggaran HAM dalam perspektif keadilan transisi.

Mengabaikan pengalaman kekerasan masa lalu yang dialami oleh korban akan mengaburkan pengakuan dan pengungkapan kebenaran yang merupakan dasar pemenuhan hak para korban pelanggaran HAM, serta menghilangkan kemampuan masyarakat untuk belajar dari kesalahan dan membangun keadilan bagi generasi di masa depan. Negara saat ini harus mampu memberikan pengakuan serta reparasi kepada korban pelanggaran HAM terutama para korban yang terdampak COVID-19.

Temuan survei memperlihatkan bagaimana impunitas dan menyempitnya ruang demokrasi saat ini mempengaruhi pola hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya, terutama dengan kelompok yang menjadi korban pelanggaran HAM.

1. Meskipun banyak korban yang masuk dalam kriteria penerima bantuan atas dasar pertimbangan ekonomi, namun bantuan tersebut tidak bisa memberikan pemulihan yang efektif dan jangka panjang. Hal ini disebabkan karena belum adanya pengakuan yang resmi dari negara atas perlakuan yang diderita mereka di masa lalu. Faktor pengakuan ini juga yang menyebabkan luputnya pemerintah mempertimbangkan kebutuhan khusus korban pelanggaran HAM di masa pandemi, seperti kebutuhan akan pengecekan kesehatan dan turunan pelaksanaannya yang tidak membangkitkan diskriminasi dan trauma masa lalu.



KESIMPULAN

2. Berbagai kelompok masyarakat dan korban bahu-membahu menghubungkan diri satu sama lain mencari opsi bertahan hidup di tengah pandemi. Mereka tidak hanya sekedar menunggu bantuan dari pemerintah. Korban memiliki tingkat kepercayaan yang rendah atas efektifitas bantuan pemerintah. Hal ini kuat diyakini oleh kelompok korban yang telah puluhan tahun menuntut hak atas pengakuan dan pemulihan dari berbagai bentuk diskriminasi, kekerasan, dan ketidakadilan yang mereka alami.
3. Akses informasi yang sulit, inkonsistensi, penuh pencitraan, dan ketidakharmonisan antara para pemangku kepentingan, mulai dari kepala desa hingga presiden, menempatkan para korban lebih mengandalkan informasi mengenai COVID-19 dari para pendamping korban dan organisasi yang membantu advokasi atas hak-hak mereka.
4. Masyarakat secara umum tidak menaati kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar karena tidak yakin dengan manfaat positif kepada mereka dalam jangka panjang akibat terjadinya kesulitan ekonomi. Sebagian dari kelompok masyarakat akhirnya tenggelam dalam narasi konspiratif yang semakin memperkeruh usaha bersama dalam melawan COVID-19. Para korban menjadi kelompok yang rentan terpapar narasi dan informasi menyesatkan yang beredar luas di masyarakat.
5. Pemerintah, di sisi lain, semakin memperkeruh hubungan dengan rakyatnya melalui kurangnya transparansi disertai komunikasi publik yang buruk dalam merespon COVID-19. Hal ini diakui oleh sejumlah pernyataan pejabat pemerintah di media yang menyebutkan beberapa informasi sengaja ditutupi dengan alasan untuk tidak menimbulkan kepanikan.

Sudah saatnya pemerintah Indonesia tidak memisahkan hak asasi manusia dan demokrasi dalam setiap aspek pelayanan kesehatan. Bukan tidak mungkin tantangan lain seperti COVID-19 akan muncul dalam beberapa waktu kedepan, melihat kondisi lingkungan dan krisis iklim yang semakin buruk. Dengan bersama-sama, melalui partisipasi dan solidaritas seluruh pihak, kita bisa melangkah maju menghadapi segala bentuk tantangan yang muncul di masa depan.

Rekomendasi

CCOVID-19 adalah ujian kita bersama sebagai individu, komunitas, dan bangsa. Ini adalah saatnya untuk bersolidaritas dan bekerja sama untuk mengatasi, mengurangi dampak, dan menghentikan penyebaran virus.

Kepada Pemerintah Indonesia (memastikan hampir setiap level pemerintahan) untuk segera:

1. Memastikan penyebaran informasi yang akurat dan mudah dipahami mengenai COVID-19 dan disebarluaskan secara luas melalui aparat pemerintahannya agar tidak ada simpang siur pemahaman, termasuk pada para penyintas yang sudah lanjut usia dan berada di wilayah terpencil.
2. Memberikan subsidi, menghapus iuran bulanan, dan mengedarkan bantuan mendesak secara segera bagi para korban dan penyintas yang paling terdampak akibat pandemi. Pelaksanaan ini harus menjunjung tinggi prinsip non-diskriminatif.
3. Mengarusutamakan hak asasi manusia dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan dalam menghadapi COVID-19. Termasuk memberikan pengakuan terhadap korban pelanggaran HAM yang memiliki kebutuhan khusus selama masa COVID-19.
4. Melatih kepekaan pada setiap aparat pemerintahan yang bertugas di lapangan, serta tercermin pada pernyataan para pejabat publik yang berpengaruh, untuk tidak menimbulkan trauma berulang pada korban pelanggaran HAM dalam merespon situasi COVID-19.

Kepada kelompok masyarakat sipil Indonesia, untuk segera:

1. Mendorong pemenuhan hak dari pemerintah kepada kelompok rentan yang terdampak COVID-19. Termasuk pada kelompok korban pelanggaran HAM.
2. Mengawasi jalannya pelaksanaan bantuan dari pemerintah agar transparan dan akuntabel sehingga terhindar dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
3. Mencari opsi yang paling memungkinkan untuk membantu para korban dengan mengutamakan prinsip solidaritas serta kedaulatan rakyat supaya kebutuhan dasar dapat terpenuhi selama masa pandemi.
4. Bekerjasama dengan jaringan masyarakat sipil lainnya untuk mengidentifikasi sebanyak-banyaknya korban dan penyintas yang membutuhkan bantuan langsung untuk menyokong kebutuhan pangan sehari-hari akibat hilangnya mata pencaharian di masa pandemi.

Kepada setiap masyarakat Indonesia :

1. Mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk turut serta dalam upaya penurunan persebaran virus dengan mengikuti anjuran untuk tetap di rumah, tetap menjaga jaga jarak, serta menjaga kebersihan diri dan lingkungan.
2. Mengajak seluruh individu untuk tidak menyebarkan informasi yang keliru mengenai COVID-19. Selalu bersikap kritis dalam membaca informasi, mengambil dari sumber yang terpercaya dan menghindari penyebaran hoax.



bekerjasama dengan:

